

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Manfaat Penelitian	11
1.7. Kerangka Konseptual.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	13
2.1 Perubahan Kawasan Hutan	13
2.2 Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Terpadu.....	14
2.3 Dasar Hukum dan Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan.....	16
2.4 Penelitian Terpadu	20
2.5 Prosedur Perubahan Kawasan Hutan	23
2.6 Kriteria dan Indikator Perubahan Kawasan Hutan	25
2.7 Perubahan Kawasan Hutan dan Penataan Ruang.....	27
2.8 Perubahan Kawasan Hutan dalam RTRWP Kepulauan Riau.....	29
2.9 Landasan Teori	31
2.9.1. Metode Kualitatif	31
2.9.2. Penelitian dan Pemanfaatannya dalam Kebijakan Politik.....	32
2.9.3. Value Chain Analysis	35

2.9.4.	Fishbone Analysis.....	36
2.9.5.	Model Research, Integration, Utilization (RIU)	38
2.9.6.	Structured Analysis Design Technics (SADT)	42
2.10	Hipotesis.....	44
BAB III	METODE PENELITIAN.....	45
3.1	Lokasi Penelitian.....	45
3.2	Pendekatan Penelitian	47
3.3	Tahapan dan Prosedur Penelitian.....	48
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	49
3.4.1	Jenis dan Sumber Data	49
3.4.2	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.4.3	Analisis Data	53
3.5	Pemodelan RIU Dalam Perubahan Kawasan Hutan Yang Masuk Kriteria DPCLS	55
3.6	Menyusun Sistem Model RIU Menggunakan Structured Analysis and System Design (SADT).....	59
BAB IV	VALUE CHAIN ANALYSIS AKTIVITAS UTAMA PERUBAHAN KAWASAN HUTAN BERKATEGORI DPCLS	60
4.1	Pengusulan Perubahan Kawasan Hutan Oleh Gubernur.....	66
4.2	Penelitian Terpadu Perubahan Kawasan Hutan	73
4.3	Integrasi Penelitian Terpadu oleh KLHK	103
4.4	Utilisasi Hasil Penelitian Terpadu Oleh DPR RI	111
4.5	Publikasi Saintifik Hasil Penelitian Terpadu	119
4.6	Kesimpulan	125
BAB V	FISHBONE ANALYSIS UNTUK INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PERUBAHAN KAWASAN HUTAN	130
5.1	Infrastruktur Kebijakan.....	132
5.2	Metode Penelitian Terpadu	137
5.3	Pengorganisasian Aktor	142
5.3.1	Aktor sangat penting	144
5.3.2	Aktor penting	167
5.3.3	Aktor biasa	171
5.3.4	Problematika pengorganisasian aktor	174
5.4	Mekanisme Persetujuan Dan Penetapan DPCLS.....	179
5.5	Manajemen Sumber Daya Dan Proses.....	182
5.6	Kesimpulan	186

**BAB VI SISTEM MODEL INTEGRASI PENELITIAN TERPADU SEBAGAI
DASAR KEPUTUSAN POLITIK PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI
KAWASAN HUTAN..... 189**

6.1	Sistem Model Seharusnya (Expected)	189
6.2	Kesenjangan Sistemik Integrasi Penelitian Terpadu Sebagai Dasar Keputusan Politik Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ...	199
6.3	Penguatan Sistemik Integrasi Penelitian Terpadu dalam Keputusan Politik Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan.....	203
6.3.1	Penguatan Kedudukan Politik Penelitian Terpadu.....	204
6.3.2	Manajemen Pengetahuan dalam Integrasi Penelitian Terpadu Untuk Keputusan Politik.....	206
6.4	Universalitas Sistem Model Integrasi Penelitian Terpadu dalam Keputusan Politik Perubahan Kawasan Hutan Berbasis RIU	209
6.5	Kesimpulan	214

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 217

7.1	Kesimpulan	217
7.2	Saran	220

DAFTAR PUSTAKA 222

LAMPIRAN..... 231

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Aturan Hukum Perubahan Kawasan Hutan	16
Tabel 2.2. Perbedaan Antara Peneliti dan Politisi	32
Tabel 3.1. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan dalam Penelitian	49
Tabel 3.2. Responden dan Kebutuhan Datanya	52
Tabel 4.1. Luas daratan, kawasan hutan dan DPCLS yang diusulkan perubahannya.	46
Tabel 4.2. Fungsi kawasan hutan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau ...	68
Tabel 4.3. Luas kawasan hutan Pulau Batam menurut SK No. 47/Kpts-II/1987..	69
Tabel 4.4. Usulan perubahan kawasan hutan	69
Tabel 4.5. Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan	70
Tabel 4.6. Usulan perubahan fungsi kawasan hutan	70
Tabel 4.7. Perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan	71
Tabel 4.8. Rekapitulasi usulan perubahan kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau.	71
Tabel 4.9. Komposisi dan jumlah anggota Tim Terpadu	74
Tabel 4.10. Luas kawasan hutan sesuai pemutakhiran TGHK dan usulan dalam RTRW	79
Tabel 4.11. Usulan perubahan kawasan hutan hasil pemutakhiran	79
Tabel 4.12. Rekomendasi penelitian terpadu perubahan kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau	80
Tabel 4.13. Status kawasan hutan dan bukan kawasan hutan berdasarkan rekomendasi penelitian terpadu	81
Tabel 4.14. Rincian perubahan kawasan hutan pada masing-masing status kawasan hutan	82
Tabel 4.15. Para pemangku kepentingan dalam KLHS	83
Tabel 4.16. Keterkaitan antara perubahan fungsi dengan isu strategis lingkungan hidup	86
Tabel 4.17. Identifikasi perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk kriteria DPCLS per kabupaten/kota	88
Tabel 4.18. Identifikasi perubahan peruntukan lahan yang masuk kriteria DPCLS pada hutan produksi	90
Tabel 4.19. DPCLS pada pulau-pulau kecil dan terluar	91
Tabel 4.20. Identifikasi hutan mangrove yang masuk kriteria DPCLS masing- masing kabupaten	92
Tabel 4.21. Kawasan hutan pesisir yang masuk kriteria DPCLS setiap kabupaten	94
Tabel 4.22. Tipologi kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan rekomendasi penelitian terpadu	100
Tabel 4.23. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk kriteria DPCLS	111
Tabel 4.24. Aturan perundang-undangan dalam perubahan kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Perubahan Kawasan Hutan dalam RTRWP Kepulauan Riau.	4
Gambar 1.2. Alur Proses Perubahan Kawasan Hutan Menurut UU No 41 Tahun 1999.	18
Gambar 2.1. Cause-and-effect diagram. (Sumber: ConceptDraw Solution Park, 2014)	37
Gambar 2.2. Model RIU dalam transfer ilmu pengetahuan. Sumber: Böcher (2016).....	38
Gambar 2.3. Konsep Structural Analysis Design.....	43
Gambar 3.1. Kerangka Alur Penelitian	48
Gambar 4.1. The RIU model of scientific knowledge transfer	57
Gambar 4.2. Value chain analysis persetujuan dan penetapan perubahan kawasan hutan yang masuk kriteria DPCLS	64
Gambar 4.3. Proses perubahan kawasan hutan dalam revisi RTRWP Kepulauan Riau.....	116
Gambar 4.4. Fishbone analysis aktor penting dan berpengaruh, beserta isu terkait dalam perubahan kawasan hutan Provinsi Kepri	131
Gambar 4.5. Metodologi penelitian terpadu perubahan kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau.....	138
Gambar 4.6. Kelompok aktor perubahan kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau	174
Gambar 4.7. Diagram Aliran Data, Informasi, atau Pengetahuan Level 1 pada Sistem Pengambilan Keputusan Politik Perubahan Kawasan Hutan Berkategori DPCLS Berbasis RIU	193

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Kronologi Perubahan DPCLS	232
Lampiran B. Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Riau	234
Lampiran C. Peta perubahan peruntukan kawasan hutan berkategori DPCLS	235
Lampiran D. Gambar Peta Kawasan Hutan Propinsi Kepulauan Riau	237
Lampiran E. Surat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No 0224 Tahun 2009 tentang usulan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan Prov. Kepulauan Riau	238
Lampiran F. Surat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No 109 Tahun 2012 tentang Penyampaian peta usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka paduserasi TGHK dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau	239
Lampiran G. Surata Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No 205 Tahun 2013 tentang Pembahasan perubahan peruntukan kawasan hutan berkategori DPCLS ..	241
Lampiran H. SK Menteri Kehutanan No 676 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu	243
Lampiran I. SK Menteri Kehutanan No 116 tentang perubahan Tim Terpadu	248
Lampiran J. SK Menteri Kehutanan No 463/Menhut-II/2013	252
Lampiran K. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.76/MenLHK- II/2015	261
Lampiran L. SK Menteri LHK No SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018	270
Lampiran M. Surat Komisi IV ke Pimpinan DPR RI	280
Lampiran N. Surat Wakil Ketua DPR RI Ke Menteri Kehutanan RI	282
Lampiran O. Hasil pertemuan antara Ombudsman RI dengan Ditjen Planologi Kehutanan	283
Lampiran P. Hasil keputusan Ombudsman RI No 202 Tahun 2014	284